



Potensi UKM

Terbesar Fashion

■ Diskopnakertrans Data Pengurusan IUM

■ Sediakan Anggaran Pengembangan Rp4,6 Miliar

YOGYA. TRIBUN
Anggaran pengembangan UKM 2019 di Kota Yogyakarta cukup besar, mencapai Rp4,6 miliar. Pemerintah setempat pun terus meng-update data pelaku UKM. Berdasarkan data, jumlah pelaku UKM di Yogyakarta sekitar 3.244. Jumlah itu mengacu pada pelaku UKM yang sudah memiliki Izin Usaha Mikro (IUM). Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Kota Yogyakarta, Lucy Irawati, mengatakan, potensi UKM di Kota Yogyakarta meliputi tiga hal, yakni fashion, kuliner, dan kriya.

Menurut Lucy, pihak Diskopnakertrans saat ini sedang terus berproses dalam melakukan pendataan pelaku UKM di Kota Yogyakarta. Ia menyebut pendataan menjadi bagian upaya yang paling menantang.

Diskopnakertrans selalu mendorong pelaku UKM segera mendaftarkan usaha dan mendapatkan IUM. Satu di antaranya melalui program penumbuhan wirausaha baru, yakni Home Business Camp (HBC) yang sudah kali keenam digelar. Dan, Karang Mitra Usaha (KAMU) yang sudah digelar kali kedua.

"HBC menasar warga usia 18-28 tahun dengan pelatihan dan pendampingan selama dua tahun. Sementara KAMU menasar usia 29 tahun ke atas, juga dengan pelatihan dan pendampingan. Mereka ini ada yang sudah punya IUM, ada yang belum, sehingga saat pelatihan kami minta segera mendaftarkan," terangnya.

Ia mengaku, jebolan dari

Kita melakukan kegiatan pendampingan UKM yang sudah ada. Tujuannya mendorong mereka segera mendapatkan legalitas dengan memiliki IUM.

Lucy Irawati
Kepala Diskopnakertrans Kota Yogyakarta

LIPUTAN KHUSUS

● ke halaman 7 **ak Lanjut**

Potensi UKM Terbesar Fashion

● Sambungan Hal 1

kedua program tersebut sangat menggembirakan. Lucy menjelaskan, dengan program tersebut Kota Yogyakarta memiliki wirausaha baru yang bermunculan dan membawa kebaruan, baik dari sisi pelaku maupun produknya.

"Selain dari program tersebut, kita melakukan kegiatan pendampingan UKM yang sudah ada. Tujuannya mendorong mereka segera mendapatkan legalitas dengan memiliki IUM," urainya.

Selain itu, untuk memajukan potensi UKM, pihaknya melakukan peningkatan SDM UKM, peningkatan kualitas dan kuantitas produk UKM, peningkatan promosi UKM melalui pameran baik di dalam maupun luar Kota Yogyakarta, serta penumbuhan dan pendampingan kampung

UKM.

"Kampung UKM maksudnya mengembangkan potensi UMKM yang ada di wilayah tersebut. Pilot project kampung UKM ada di Wirogunan Mergangasan, yang di sana banyak menonjol fashion-nya. Mulai lurik, jumputan, sibori, ecoprint, dan juga ada kerajinan yang lain dan kuliner," tuturnya.

Pasar mancanegara

Sebagaimana diberitakan *Tribun Jogja* dalam laporan liputan khusus UKM sesi pertama kemarin, UKM di DIY terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan UKM di DIY tercatat dua persen per tahunnya. Pemda DIY terus mendorong jumlah UKM terus berkembang.

Perlu diketahui, jumlah UKM di DIY pada 2018 mencapai 259.581. Jumlah itu terdiri dari usaha mikro (141.991), usaha kecil (64.896), usaha menengah (39.196), dan besar (13.498).

Jumlah UKM tersebut (data 2018), lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana jumlah UKM pada 2017 hanya 248.217; pada 2016 ada 238.619; 2015 ada 230.047; dan 2014 ada 220.703.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Sri Nurkyat-siwi, mengatakan, pihaknya memiliki program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan UKM. "UKM yang punya potensi paling besar fashion dan kuliner. Kami arahkan ke fashion agar lebih spesifik," jelasnya.

Namun, tidak menutup UKM kerajinan juga dilirik pasar mancanegara. Pihaknya membina para pelaku UKM dengan berbagai macam pembinaan diantaranya adalah untuk mengikuti kemauan pasar atau *market*

oriented.

"Kami juga mendekati mereka ke pasar. Caranya adalah dengan promosi, bagaimana kualitas produk dan juga bagaimana kearifan lokalnya karena ini adalah daerah istimewa," urainya.

Adapun permasalahan secara umum baik koperasi dan UKM pun hampir sama, yakni terkait kelembagaan dan legalitas, SDM, teknologi, pemasaran, dan pembiayaan. Bahkan, Siwi juga mengakui beberapa kegagalan program dalam pembinaan UKM yang terus dievaluasi.

"Kegagalan program ini di antaranya karena sasaran tidak pas, tata kalanya tidak pas. Maka, kami benar-benar jeli dalam melaksanakan pembinaan UKM, untuk menaikkan omzet, serta kelembagaan pemasaran. Misalnya kalau ada *event* diikutkan, pameran dengan beberapa fasilitas *booth*nya dari dinas hotel, mal dan tergantung sasaran, *market oriented* biar tahu," jelasnya.

Disinggung terkait dengan anggaran pembinaan, Siwi menyebut cukup minim. Hal ini sama dengan anggaran pembangunan yang diambilkan 10 persen dari APBD. Namun, dia tidak menyebutkan berapa detail nominalnya. "Cukup minim untuk pembinaan," katanya.

Harus tumbuh

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, mengatakan, potensi UKM

di DIY harus terus tumbuh. Satu di antaranya harus ada peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menumbuhkan investasi yang menguntungkan rakyat.

"Kalau swasta atau investor besar pertumbuhan bisa sembilan koma, tetapi rakyat kita tidak dapat apa-apa, karena investor besar inginnya untung sendiri. Tetapi kalau investasi tersebut dibangun BUMN, pertumbuhan akan tetap terjaga," jelasnya di sela-sela acara pisah sambut Anggota DPRD DIY masa bhakti 2014-2019 dengan anggota DPRD DIY 2019-2024 di Hotel Royal Ambarukmo, Kamis (26/09) malam.

Menurut Sultan, lewat BUMN, Pemda bisa berkomunikasi dengan baik, karena tindak lanjut yang dibangun akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

Adapun berdasarkan informasi dari Bank Indonesia, dengan selesainya YIA pada kwartal ke III ini, pertumbuhan perekonomian DIY menjadi 7,5 persen. Menurut Gubernur DIY, nilai pertumbuhan tersebut harus didorong dengan investasi.

"Hal ini agar pertumbuhan ekonomi DIY lebih tinggi lagi dan tidak turun menjadi 6,2 atau 6,3 atau bahkan anjlok ke 5,3 lagi," paparnya. (kur/wis/ais/jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005